



RENCANA KERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN



2024
BANTEN BERSINAR

02548241688

WWW.BANTEN.BNN.GO.ID

JL.SYEIK NAWAWI NO.7 KOTA SERANG BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten** Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana kerja disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Banten yang mengacu pada Rencana Strategi BNN RI 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Badan Narkotika Nasional.

Serang, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten**



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib menjabarkan dan mengoperasionalkan rencana kerjanya selama setahun.

BNN Provinsi Banten sebagai perpanjangan tangan BNN RI dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyusun Rencana Kerja TA. 2024. Rencana Kerja ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, dan harmonisasi Renproja ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur.

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN bersama BRIN pada tahun 2023, angka prevalensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 1,95 % tahun 2021 menjadi 1,73% tahun 2023. Prevalensi 1,73 artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terdapat 173 orang terpapar narkoba dalam kurun 12 bulan terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa. Adapun Jenis Narkoba yang paling banyak dipakai yaitu: Ganja dan Shabu. Permasalahan narkoba yang semakin meningkat di Banten ditunjukkan

oleh banyaknya informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di daerah maupun di pedesaan.

Kondisi kewilayahan Provinsi Banten dengan luas wilayah terhitung kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan luas 9.662,92 kilometer persegi atau sekitar 0,51 persen dari luas daratan Indonesia, Banten adalah provinsi terkecil kelima di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 12,25 juta jiwa pada tahun 2022. Secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Provinsi Banten merupakan pintu gerbang dengan adanya Pelabuhan Merak maupun pelabuhan kecil lainnya dengan arus pergerakan manusia, barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, Provinsi Banten memiliki garis Pantai sepanjang 499,62 kilometer, yang merupakan daerah pesisir yang menjadi sasaran masuknya narkoba karena kondisi geografis pantai yang cukup Panjang dan lokasi yang masih dalam kategori *blank spot area*. Pada tahun 2023 BNN Provinsi Banten berhasil mengungkap sebanyak 13 berkas perkara dengan 13 orang tersangka dan mengamankan barang bukti barang bukti narkoba shabu sebanyak 15.381 gram dan ganja sebanyak 63.151 gram.

Saat ini baru terbentuk 4 (empat) satuan kerja BNN di Provinsi Banten yaitu BNN Provinsi Banten, BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon, dan BNN Kota Tangerang sehingga diperlukan zonasi wilayah agar dapat menjangkau seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 BNN Provinsi Banten memperhatikan kondisi kerawanan narkoba di Provinsi Banten, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Banten Tahun 2023, serta berbagai permasalahan terkini yang dihadapi BNN Provinsi Banten dan BNNK Jajaran.

2. Kondisi Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2023

Penetapan Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2023 menetapkan sebanyak 13 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 indikator. Berikut evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten pada periode tahun 2023:

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:
 - meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi dengan capaian sebanyak **3 kabupaten/kota**;
 - meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi dengan capaian sebanyak **3 kabupaten/kota**;
 - meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah Provinsi dengan capaian sebanyak **3 kabupaten/kota**;
 - meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator kinerja yakni jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi waspada sebanyak **1 kawasan**;
 - nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **3,1 indeks**.
- b. Bidang Rehabilitasi memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup dengan capaian sebesar **77,14%**;
 - meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan dua indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan capaian sebanyak **49 orang** dan jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak dengan capaian **6 orang**;
 - meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi sebanyak dengan capaian **1 lembaga** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional sebanyak dengan capaian **8 unit**;
 - meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Banten dengan capaian **3,53 indeks**.
- c. Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:
- meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan capaian sebesar **17 berkas perkara**;
 - meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dengan capaian sebesar **100 indeks** dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dengan capaian sebesar **100 indeks**.

- d. Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:
- meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten dengan capaian sebesar **87,18 indeks** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak **2 kabupaten/kota**;
 - meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Banten dengan capaian sebesar **98,68 indeks** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target dengan capaian sebanyak **2 kabupaten/kota**;
 - meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan satu indikator kinerja yakni nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal dengan capaian nilai sebesar **83,56 indeks**.

Berikut tabel realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2023:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di	2 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten / Kota	150%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		wilayah provinsi			
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten / Kota	150%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten / Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,1 Indeks	3,1 Indeks	100%
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	60%	77,14%	128,57%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	40 Orang	49 Orang	122,5%
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	6 Orang	120%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit	8 Unit	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2 Indeks	3,53 Indeks	110,31%
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara	17 Berkas Perkara	113,33%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100 Indeks	100%
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	87,18 Indeks	100,21%
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	66,67%
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,68 Indeks	107,26%
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
19	Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks	75,32 Indeks	100,45%

Terdapat 1 (satu) target kinerja BNN Provinsi Banten pada tahun 2023 yang tidak tercapai, namun ada indikator yang melampaui target. Penentuan target kinerja BNN Banten pada tahun 2024 memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024.
2. Capaian target kinerja terakhir yang dievaluasi yaitu tahun 2023.
3. Dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Banten Tahun 2020-2024.

3. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penangan Permasalahan Narkoba

Pelaksanaan program P4GN di BNN Provinsi Banten masih memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Terdapat anggaran yang terblokir karena kebijakan *Automatic Adjustment* sehingga untuk pelaksanaan kegiatan perlu penyesuaian kembali;
- b. Sumber daya manusia, baik di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota masih kurang terlatih sehingga diperlukan kegiatan pengembangan/pelatihan kemampuan pegawai;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Banten dan BNNK Jajaran;
- d. Terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap di Provinsi Banten yang mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi sesuai hasil assesment

termasuk yang sudah menjalani TAT sehingga lapas/rutan over capacity. Selain itu belum tersedianya anggaran untuk pengantaran pecandu dan/atau korban penyalahguna yang sudah *inchrah* ke balai rehabilitasi di luar Provinsi Banten.

- e. Stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu (orang tua pecandu baru akan bertindak jika anaknya telah menunjukkan hal yang serius, misalnya telah mengalami gejala gangguan mental dan overdosis serta kriminal).
- f. Baru terbentuk 3 (tiga) BNN Kabupaten/Kota dari 8 (delapan) kabupaten / kota di Provinsi Banten menjadikan pelaksanaan P4GN belum maksimal untuk menjangkau seluruh pelosok Provinsi Banten.
- g. BNN Provinsi Banten belum dapat melaksanakan program P4GN secara maksimal sampai ke seluruh pelosok Provinsi Banten mengingat topografi wilayahnya yang sangat luas, keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, keterbatasan sarana prasarana, dan belum terbentuknya BNN Kabupaten/Kota pada 6 (enam) kota/kabupaten lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

1. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Sejalan dengan Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, BNN sebagai *focal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BNN Tahun 2020-2024 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN sebagai berikut:

VISI: "Mewujudkan Masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dar kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong."

Adapun **misi** yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara professional;
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan Masyarakat terhadap kejahatan narkoba;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Sedangkan **tujuan** BNN yang ditetapkan adalah:

1. Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Indikator: Angka Prevalensi
2. Mewujudkan transformasi layanan public yang berkualitas. Indikator: Indikator Pelayanan Publik

Sasaran Strategis BNN yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024

Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas					
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Pelayanan Publik					
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi					
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)	Indeks Reformasi Birokrasi					
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Selektariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Pemenuhan Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kespuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN, yaitu:

1. Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan, dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari Luar Negeri ke Dalam Negeri. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi melaksanakan *active defense* melalui penguatan kerjasama dan penggalangan informasi di luar negeri serta peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan negara dan *entry point*.

2. Arah kebijakan 2 (dua) dirumuskan untuk meningkatkan daya kemampuan dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi siber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan prekursor narkotika di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksi narkoba, penindakan dan penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
3. Arah kebijakan 3 (tiga) meliputi antara lain: pengembangan metode pendidikan anti narkoba (d disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba Khususnya Pada Kalangan Generasi Muda dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika; dan (2) Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.
4. Arah kebijakan 4 (empat) mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan

kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba sehingga meminimalisir kemungkinan *relaps*. Cakupannya antara lain meliputi: pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi; dan (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non-Pemerintah.

5. Arah kebijakan 5 (lima) memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja core business dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah: (1) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN; dan (2) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.
6. Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Kepada BNN Provinsi Banten

Arah kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Banten merupakan turunan dari rumusan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi BNN. Arah kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Banten juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks ketahanan remaja dan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba;
2. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam P4GN;
3. Peningkatan kualitas hidup korban penyalahgunaan narkoba;
4. Peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, kualitas lembaga rehabilitasi, dan indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi;
5. Peningkatan pengungkapan kasus narkoba di wilayah Provinsi Banten termasuk pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba;
6. Peningkatan nilai kinerja anggaran, IKPA, dan tata kelola reformasi birokrasi;
7. Peningkatan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* terkait dalam melaksanakan P4GN.

Pada tahun 2024 penyelarasan strategi dari BNN RI yang dimandatkan kepada BNN Provinsi Banten dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (empat) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:
- meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi;
 - meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi dengan capaian sebanyak;
 - meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah Provinsi dengan capaian sebanyak:
- b. Bidang Rehabilitasi memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu
- meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup;
 - meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih;
 - meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi dan indikator kinerja jumlah

- unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional;
- meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Banten.
- c. Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:
- meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21;
 - meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba.
- d. Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:
- meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target;
 - meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Banten dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target;
 - meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan satu indikator kinerja yakni nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menetapkan rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN periode tahun 2024 di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Banten Tahun 2024 digabungkan bersama dengan rencana kerja BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon, dan BNN Kota Tangerang dan usulan dari Bidang dan Bagian di BNN Provinsi Banten. Rencana kerja Tahun 2024 berisikan yaitu:

- a. Target kinerja BNN Provinsi Banten adalah akumulasi target seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Banten;
- b. Pendanaan pada rencana kerja merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Banten;
- c. Rencana kerja dan pendanaan telah mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah Banten;
- d. Rencana Kerja dan pendanaan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2024 membutuhkan masukan (input) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada table Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Banten dan jajaran Tahun 2024.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Pencapaian target kinerja memungkinkan kita mengidentifikasi sejauhmana kemampuan satker dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, terdiri dari:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi;
 - c. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat;
 - e. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti;
 - f. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - g. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
 - h. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika;
 - i. Kegiatan Pengeloaan Informasi Edukasi.

2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
 - b. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya.
 - c. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

Adapun kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Banten beserta jajaran untuk tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL KEBUTUHAN PENDANAAN BNN PROVINSI BANTEN DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN	PAGU				
		BANTEN	TANGSEL	CILEGON	TANGERANG	TOTAL
	TOTAL PAGU	9.269.840.000	2.470.353.000	1.771.591.000	1.988.343.000	15.500.127.000
3247	Penyelenggaraan Advokasi	116.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	434.000.000
3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	125.000.000	-	-	-	125.000.000
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	28.710.000	9.805.000	6.775.000	6.825.000	52.115.000
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	239.002.000	220.045.000	220.045.000	220.045.000	899.137.000
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	159.430.000		8.850.000	8.850.000	177.130.000
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.690.000	14.530.000	14.530.000	14.530.000	58.280.000
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	161.355.000	250.454.000	133.787.000	242.435.000	788.031.000
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	400.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	490.000.000
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	183.000.000	70.000.000	70.000.000	65.000.000	388.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN	PAGU				
		BANTEN	TANGSEL	CILEGON	TANGERANG	TOTAL
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4.866.004.000	111.476.000	90.504.000	101.788.000	5.169.772.000
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	28.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	61.500.000
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	14.729.000	13.555.000	12.433.000	13.351.000	54.068.000
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2.913.420.000	1.623.488.000	1.057.667.000	1.158.519.000	6.753.094.000
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000

Matriks Rencana Kerja BNN Provinsi Banten

Unit Kerja : BNN Provinsi Banten

Tahun : 2024

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten /Kota	388.000.000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	434.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		narkotika				
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	899.137.000
4	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%	52.115.000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	58.280.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2	Lembaga	788.031.000
		2. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8	Unit	
		3. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,06	Indeks	

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dan Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10	Berkas Perkara	490.000.000
8	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	1. Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks	177.130.000
		2. Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
9	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	Indeks	54.068.000
		2. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,78	Indeks	6.803.094.000
		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
11		Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76	Indeks	0

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Banten Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kerja ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Banten, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2024. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang. Sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten untuk dapat dioperasionalkan membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan BNN Provinsi Banten dan BNNK Jajaran pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.15.500.127.000,-.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten**



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

LAMPIRAN

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
Tahun 2024

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	5 Keluarga 2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
4.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	20 Orang
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional di wilayah Provinsi Banten 3. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	70 Orang
			Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	3 Laporan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dan Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	6 Berkas Perkara
			Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2 Laporan
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan Asesmen Terpadu pelaku tindak pidana narkotika	22 orang
			Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	15 Orang
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 Produk
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Laporan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	12 Layanan
		2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	12 Layanan
12.		Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal		76 Indeks



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROPINSI BANTEN



BANTEN BERSINAR

02548241688

WWW.BANTEN.BNN.CO.ID

JL.SYEIK NAWAWI NO.7 KOTA SERANG BANTEN